

**PEMERINTAH KABUPATEN  
TEMANGGUNG  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,  
PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>2</b>
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	5
<b>BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD</b>	<b>6</b>
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	6
2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan	11
<b>BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD</b>	<b>12</b>
3.1. Rincian penjelasan dari masing-masing pos-pos Pelaporan Keuangan SKPD	12
3.1.1. Pendapatan-LRA	12
3.1.2. Belanja-LRA	23
3.1.3. Pendapatan-LO	32
3.1.4. Beban-LO	37
3.1.5. Aset	38
3.1.6. Kewajiban	55
3.1.7. Ekuitas Dana	59
3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD.	62
<b>BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD</b>	<b>63</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>66</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu

entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023, secara sistematis terdiri dari:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA  
KEUANGAN SKPD
- BAB III : PENJELASAN POS-POS LAPORAN  
KEUANGAN SKPD
- BAB IV : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI  
NON KEUANGAN SKPD
- BAB V : PENUTUP

## BAB II

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

#### 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Pada bab ini disajikan guna memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan BPKPAD dalam merealisasikan anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan. APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 dan telah melakukan perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Ringkasan Perubahan APBD BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 sebagaimana Tabel 2.1.1

**Tabel 2.1.1**  
**Ringkasan Perubahan APBD BPKPAD Kabupaten Temanggung**  
**Tahun Anggaran 2023**

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
5.02.0.00.0 .00.04.000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah		
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>101.812.128.232,00</b>	<b>107.637.723.758,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	69.510.000.000,00	74.947.290.400,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.922.771.777,00	21.311.076.903,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	11.379.356.455,00	11.379.356.455,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.578.275.002.400,00</b>	<b>1.664.873.571.032,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.456.496.609.400,00	1.512.888.443.550,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	121.778.393.000,00	151.985.127.482,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.680.087.130.632,00</b>	<b>1.772.511.294.790,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>29.030.346.806,00</b>	<b>21.816.716.415,00</b>

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran Penetapan (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
5.1.01	Belanja Pegawai	24.857.541.306,00	17.157.755.915,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.172.805.500,00	4.658.960.500,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>12.250.000,00</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.200.000,00	12.250.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>2.500.000.000,00</b>	<b>800.000.000,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	800.000.000,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>397.196.846.807,00</b>	<b>407.723.588.807,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.997.804.000,00	7.997.804.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	389.199.042.807,00	399.725.784.807,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>428.736.393.613,00</b>	<b>430.352.555.222,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>1.251.350.737.019,00</b>	<b>1.342.158.739.568,00</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>104.754.613.435,00</b>	<b>150.159.947.520,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	104.747.613.435,00	148.607.977.520,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	7.000.000,00	7.000.000,00
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>104.754.613.435,00</b>	<b>150.159.947.520,00</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>16.807.414.000,00</b>	<b>1.807.414.000,00</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.807.414.000,00	1.807.414.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>16.807.414.000,00</b>	<b>1.807.414.000,00</b>
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>87.947.199.435,00</b>	<b>148.352.533.520,00</b>

Pada Tahun Anggaran 2023, BPKPAD Kabupaten Temanggung melakukan Perubahan APBD sehubungan dengan adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.

Adapun Realisasi Anggaran Tahun 2023 merupakan ukuran kinerja keuangan BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 yang ditampilkan dalam Tabel 2.1.2 sebagai berikut:



**Tabel 2.1.2**  
**Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023**

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)
5.02.0.00.0.00.04.000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah			
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.772.511.294.790,00</b>	<b>1.763.730.620.746,00</b>	<b>99,50</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>107.637.723.758,00</b>	<b>110.143.302.519,00</b>	<b>102,33</b>
4.1.01	Pajak Daerah	74.947.290.400,00	79.677.898.921,00	106,31
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.311.076.903,00	21.311.076.903,00	100
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	11.379.356.455,00	9.154.326.695,00	80,45
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.664.873.571.032,00</b>	<b>1.653.587.318.227,00</b>	<b>99,32</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.512.888.443.550,00	1.517.163.835.087,00	100,28
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	151.985.127.482,00	136.423.483.140,00	89,76
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	100
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.772.511.294.790,00</b>	<b>1.763.730.620.746,00</b>	<b>99,50</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>430.352.555.222,00</b>	<b>427.610.626.681,00</b>	<b>99,36</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>21.816.716.415,00</b>	<b>20.437.722.246,00</b>	<b>93,68</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	17.157.755.915,00	16.723.736.915,00	97,47
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.658.960.500,00	3.713.985.331,00	79,72
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>12.250.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>100</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.250.000,00	12.500.000,00	100
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	100
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	800.000.000,00	0,00	0,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>407.723.588.807,00</b>	<b>407.160.654.435,00</b>	<b>99,86</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.997.804.000,00	7.985.769.628,00	99,85

Kode Rekening	Nama Rekening	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Persentase (%)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	399.725.784.807,00	399.174.884.807,00	99,86
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>1.342.158.739.568,00</b>	<b>1.336.119.994.065,00</b>	<b>99,55</b>

Target pendapatan dalam APBD BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.772.511.294.790,00 dengan realisasi sebesar Rp1.763.730.620.746,00 atau dengan capaian realisasi sebesar 99,50%. Realisasi pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan realisasi sebesar Rp110.143.302.519,00 atau mencapai 102,33% dari target anggaran sebesar Rp107.637.723.758,00. Pendapatan Transfer sebesar Rp1.653.587.318.227,00 atau mencapai 99,32% dari target anggaran sebesar Rp1.664.873.571.032,00. Jika digunakan indikator persentase capaian target anggaran pendapatan sebagai skala pengukuran kinerja keuangan dari yang sangat buruk sampai dengan sangat baik (0%-100%), secara keseluruhan dapat dikategorikan kinerja keuangan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2023 yang mencapai 99,50% termasuk dalam kategori baik. Faktor pendorong tercapainya target yaitu:

- (1) Penyesuaian kembali Tarif ketetapan Pajak Daerah, Pemutakhiran Data/Penambahan Data WP dan Penerimaan Denda atas keterlambatan pembayaran pajak daerah (Untuk PBB-2 adanya pengurangan denda keterlambatan sehingga target dapat dipenuhi).
- (2) Tersedianya sistem aplikasi *open tax* dan *e-BPHTB* sebagai alat untuk verifikasi data dengan beberapa instrumen pendukung seperti referensi dan informasi dari berbagai media.
- (3) Tersedianya sistem aplikasi SIAP PAKDE sebagai alat untuk mengolah data pengajuan SKPD reklame, dan meningkatnya kesadaran WP badan (*vendor*) reklame.
- (4) Kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran pajak dan retribusi.
- (5) Tingkat kesadaran perangkat daerah dalam melaporkan capaian pendapatan terbilang tinggi, disamping itu peran serta dari petugas dalam mengingatkan tentang kewajiban pelaporan pendapatan juga menjadi faktor pendukung tercapainya target serta kesadaran warga dalam membayar pajak daerah.

- (6) Sosialisasi yang dilakukan oleh BPKPAD dan pemasangan alat rekam transaksi usaha secara elektronik di beberapa tempat usaha.

APBD BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 menetapkan jumlah anggaran belanja daerah sebesar Rp430.352.555.222,00 dengan realisasi sebesar Rp427.610.626.681,00 atau mencapai 99,36% dari anggaran. Realisasi belanja daerah tersebut terdiri dari Belanja Operasi dengan realisasi sebesar Rp20.437.722.246,00 atau mencapai 93,68% dari anggaran sebesar Rp21.816.716.415,00; Belanja Modal sebesar Rp12.500.000,00 atau mencapai 100%; Belanja Tak Terduga sebesar Rp0,00 atau mencapai 0,00% dari anggaran sebesar Rp800.000.000,00; dan Belanja Transfer sebesar Rp407.160.654.435,00 atau mencapai 99,86% dari anggaran sebesar Rp407.723.588.807,00. Jika digunakan indikator persentase capaian penyerapan belanja daerah sebagai skala pengukuran kinerja keuangan belanja daerah dari yang sangat buruk sampai dengan sangat baik (0%-100%), secara keseluruhan dapat dikategorikan kinerja TA 2023 dari penyerapan belanja daerah yang mencapai sebesar 99,36%, termasuk kategori baik.

## 2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Dalam Pencapaian target kegiatan, terdapat beberapa faktor yang menghambat tercapainya target kegiatan, antara lain adalah sebagai berikut:

- (1) Belum semua Wajib Pajak mempunyai kesadaran sendiri untuk mendaftarkan objeknya, sedangkan petugas dan sumber daya bidang pendapatan sangat terbatas
- (2) PBB-P2 masih bergantung pada peran aktif wajib pajak dan perangkat desa, sedangkan untuk BPHTB masih bergantung pada peran PPAT/PPATS.
- (3) Masih ditemukan perbedaan antara izin dan pajak reklame, sedangkan Satpol PP belum mempunyai data yang terkirim secara cepat dan otomatis terkait pelanggaran izin dan pajak reklame.
- (4) Pelaporan yang dilakukan tidak bisa diawal waktu, seringkali terjadi diatas tanggal 5 tiap awal bulannya. hal ini disebabkan karena sumber daya manusia di perangkat daerah terbatas dan bertumpuknya tugas yang lain membuat pelaporan tidak dapat dilakukan awal waktu.

**BAB III**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

**3.1. Rincian penjelasan dari masing-masing pos-pos Pelaporan Keuangan SKPD**

**3.1.1. Pendapatan-LRA**

Realisasi Pendapatan Daerah adalah sebesar Rp1.763.730.620.746,00 atau 99,50% dari target yang ditetapkan dalam APBD Tahun 2023 sebesar Rp1.772.511.294.790,00 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dengan anggaran dan realisasi sebagai berikut:

**Tabel 3.1**

**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah-LRA TA 2023**

No	PENDAPATAN	Tahun 2023			Realisasi Tahun 2022 (Rp)
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.772.511.294.790,00</b>	<b>1.763.730.620.746,00</b>	<b>99,50</b>	<b>1.698.622.625.487,00</b>
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	107.637.723.758,00	110.143.302.519,00	102,3	111.844.597.518,00
2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.664.873.571.032,00	1.653.587.318.227,00	99,32	1.585.778.027.969,00
3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung sebesar Rp1.763.730.620.746,00 atau 99,50% dari target sebesar Rp1.772.511.294.790,00 Hal ini disebabkan karena: Kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 102,3% dan Pendapatan Transfer sebesar 99,32%.

Apabila dibandingkan pendapatan tahun 2022 sebesar Rp1.698.622.625.487,00 maka terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp65.107.995.259,00 atau 3,83% dari tahun 2022. Adapun realisasi masing-masing jenis Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

### 3.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH-LRA

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp110.143.302.519,00 atau 2,3% lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar Rp107.637.723.758,00. PAD disajikan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.2**

#### **Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA TA 2023**

No	PENDAPATAN	Tahun 2023			Realisasi (Rp) Tahun 2022
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>107.637.723.758,00</b>	<b>110.143.302.519,00</b>	<b>102,3</b>	<b>111.844.597.518,00</b>
1.	Pajak Daerah	74.947.290.400,00	79.677.898.921,00	106,3	74.191.559.232,00
2.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.311.076.903,00	21.311.076.903,00	100	21.426.146.839,00
3.	Lain-lain PAD yang Sah	11.379.356.455,00	9.154.326.695,00	80,44	16.226.891.447,00

Realisasi masing-masing jenis PAD tahun anggaran 2023 dan 2022 dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

#### 3.1.1.1.1 PENDAPATAN PAJAK DAERAH-LRA

PAD yang berasal dari pendapatan pajak daerah BPKPAD Kabupaten Temanggung meliputi pendapatan dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, PBB-P2 serta BPHTB yang dikelola oleh Bidang Pendapatan BPKPAD. Realisasi penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp79.677.898.921,00 atau 106,33% dari target yang ditetapkan sebesar Rp74.947.290.400,00, dengan demikian realisasi pajak daerah tahun anggaran 2023 melampaui target sebesar Rp4.730.608.521 atau 6,32%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp5.486.339.689,00 atau 7,39% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp74.191.559.232,00. Lebih rinci mengenai realisasi penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2023 digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3.3****Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA TA 2023**

No	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Tahun 2023			Realisasi (Rp) Tahun 2022
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>PAJAK DAERAH</b>	74.947.290.400,00	79.684.351.382,00	<b>106,32</b>	<b>74.191.559.232,00</b>
1.	Pajak Hotel	220.000.000,00	280.879.388,00	127,67	228.153.674,00
2.	Pajak Restoran	2.432.290.400,00	3.486.050.798,00	143,32	2.870.817.379,00
3.	Pajak Hiburan	75.000.000,00	98.912.750,00	131,88	100.279.100,00
4.	Pajak Reklame	750.000.000,00	1.007.387.934,00	134,32	813.975.191,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	21.000.000.000,00	21.913.140.117,00	104,35	21.185.723.472,00
6.	Pajak Parkir	150.000.000,00	150.060.151,00	100,04	144.889.706,00
7.	Pajak Air Tanah	320.000.000,00	320.787.735,00	100,25	350.576.370,00
8.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	26.000.000.000,00	26.628.055.685,00	102,42	25.651.580.898,00
9.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	24.000.000.000,00	25.792.624.363,00	107,47	22.845.563.442,00

Realisasi penerimaan 9 pajak daerah TA 2023 seluruhnya telah melampaui target. Jika dibandingkan dengan TA 2022 dari 9 Pajak Daerah banyak mengalami kenaikan. Maka kinerja keuangan Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dapat dikatakan baik.

### **3.1.1.1.2 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN-LRA**

Pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang diperoleh BPKPAD Kabupaten Temanggung bersumber dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD. Pada TA 2023 pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan sebesar Rp21.311.076.903,00 dengan realisasi sebesar Rp21.311.076.903,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.4**

**Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA TA 2023**

No	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Tahun 2023			Realisasi (Rp) Tahun 2022
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN</b>	<b>21.311.076.903,00</b>	<b>21.311.076.903,00</b>	<b>100</b>	<b>21.426.146.839,00</b>
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	15.933.744.748,00	15.933.744.748,00	100	15.590.292.144,00
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	171.787.315,00	171.787.315,00	100	1.280.186.273,00
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	5.205.544.840,00	5.205.544.840,0	100	4.555.668.422,00

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2023 mengalami penurunan dibandingkan penerimaan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp(115.069.936,00) atau (0,54)% dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp21.426.146.839,00.

**3.1.1.1.3 LAIN-LAIN PAD YANG SAH-LRA**

Lain-lain PAD yang Sah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp11.379.356.455,00 dengan realisasi sebesar Rp9.152.269.149,00 atau sebesar 80,43% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.5**

**Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah-LRA TA 2023**

No	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Tahun 2023			Realisasi (Rp) Tahun 2022
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>	<b>11.379.356.455,00</b>	<b>9.154.326.695,00</b>	<b>80,45</b>	<b>16.226.891.447,00</b>
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	405.608.200,00	100	0,00
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.400.000.000,00	1.898.996.944,00	79,12	1.978.408.221,00
3.	Jasa Giro	737.226.286,00	309.851.264,00	42,03	467.911.281,00
4.	Pendapatan Bunga	7.208.630.169,00	4.942.899.324,00	68,57	8.406.164.287,00
5.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	23.500.000,00	14.600.000,00	62,13	13.250.000,00
6.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	469.938.947,00	100	3.586.094.365,00
7.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	10.000.000,00	333.483.053,00	3.334,83	90.337.565,00
8.	Pendapatan dari Pengembalian	1.000.000.000,00	779.093.672,00	77,69	1.684.725.728,00

Realisasi Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah TA 2023 mengalami Penurunan sebesar Rp(7.072.564.752,00) atau (43,58%) dibandingkan penerimaan TA 2022 sebelumnya yaitu sebesar Rp16.226.891.447,00.

**3.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER-LRA**

Pendapatan transfer merupakan penerimaan daerah yang berasal dari transfer atau penerimaan dari pemerintah pusat (APBN), pemerintah daerah lainnya maupun pemerintah provinsi dengan persentase atau pembagian tertentu. Pada tahun 2023 pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp1.664.873.571.032,00 dengan realisasi sebesar Rp1.653.587.318.227,00 atau mencapai 99,32% dari anggaran. Jika dibanding dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.585.778.027.969,00 pendapatan transfer mengalami kenaikan sebesar Rp67.809.290.258,00 atau 4,28%. Rincian pendapatan transfer tersebut adalah sebagai berikut:



**Tabel 3.6****Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer-LRA TA 2023**

No	PENDAPATAN	Tahun 2023			Realisasi (Rp) Tahun 2022
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.664.873.571.032</b>	<b>1.653.587.318.227</b>	<b>99,32</b>	<b>1.585.778.027.969</b>
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.512.888.443.550	1.517.163.835.087	100,28	1.448.787.218.335
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	151.985.127.482	136.423.483.140	89,76	136.990.809.634

**3.1.1.2.1 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LRA**

Pada tahun 2023 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp1.512.888.443.550,00 dengan realisasi sebesar Rp1.517.163.835.087,00 atau mencapai 100,28% dari anggaran. Jika dibanding dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.448.787.218.335,00 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mengalami kenaikan sebesar Rp. 68.376.616.752,00 atau 4,72%. Rincian pendapatan transfer tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.7****Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA TA 2023**

No	PENDAPATAN TRANSFER	Tahun 2023			Realisasi (Rp) Tahun 2022
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.512.888.443.550,00</b>	<b>1.517.180.290.087,00</b>	<b>100,28</b>	<b>1.448.787.218.335,00</b>
1.	Dana Perimbangan	1.241.042.602.550,00	1.245.317.994.087,00	100,34	1.200.469.313.335,00
2.	Dana Insentif Daerah (DID)	29.383.259.000,00	29.383.259.000,00	100	2.438.134.000,00
3.	Dana Desa	242.462.582.000,00	242.462.582.000,00	100	245.879.771.000,00

**3.1.1.2.1.1 DANA PERIMBANGAN-LRA**

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat (APBN) yang terdiri dari

Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Dana perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah. Pada TA 2023 pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan dianggarkan sebesar Rp1.241.042.602.550,00 dengan realisasi sebesar Rp1.245.317.994.087,00 atau mencapai 100,34% dari yang dianggarkan. Jika dibanding dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.200.469.313.335,00 pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan mengalami kenaikan sebesar Rp 44.848.680.752,00 atau 3,74%.

**Tabel 3.8**

**Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan-LRA TA 2023**

No	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Tahun 2023			Realisasi (Rp) Tahun 2022
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.241.042.602.550,00</b>	<b>1.245.317.994.087,00</b>	<b>100,34</b>	<b>1.200.469.313.335,00</b>
1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	78.856.682.134,00	75.150.038.079,00	95,30	67.967.761.249,00
2.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	779.535.375.000,00	791.039.886.585,00	101,48	751.613.837.000,00
3.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	118.890.309.000,00	109.544.079.906,00	92,14	141.115.030.563,00
4.	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	263.760.236.416,00	269.583.989.517,00	102,21	239.772.684.523,00

Penjelasan :

- Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan Pendapatan dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah (ketimpangan vertikal). Persentase dana bagi hasil (DBH) Pajak untuk setiap sumber dimuat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penetapan alokasi DBH pajak dilakukan melalui peraturan menteri keuangan. Pendapatan bagi hasil pajak yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan (PPh), Cukai Hasil Tembakau dan Sumber Daya Alam. Transfer dana perimbangan pemerintah pusat-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2023 dianggarkan sebesar Rp78.856.682.134,00 dengan realisasi sebesar Rp75.150.038.079,00 atau 95,30% dari anggaran. Realisasi penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami kenaikan sebesar Rp7.182.276.830,00 atau naik 10,57% dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp67.967.761.249,00.

- Transfer dana alokasi umum (DAU) yang diberikan oleh pemerintah pusat adalah bertujuan meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penggunaan DAU dimaksud ditetapkan oleh daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing. Transfer Dana Perimbangan Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2023 dianggarkan sebesar Rp779.535.375.000,00 dengan realisasi sebesar Rp791.039.886.585,00 atau 101,48% dari anggaran. Realisasi Penerimaan DAU TA 2023 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp39.426.049.585,00 atau 5,25% dibandingkan dengan penerimaan TA 2022 sebesar Rp751.613.837.000,00.
- Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Transfer Dana Perimbangan Pemerintah Pusat-DAK Fisik TA 2023 dianggarkan sebesar Rp118.890.309.000,00 dengan realisasi sebesar Rp109.544.079.906,00 atau 92,14% dari anggaran. Realisasi Penerimaan Transfer Dana Perimbangan Pemerintah Pusat mengalami penurunan sebesar Rp31.570.950.657,00 atau (22,37)% bila dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya sebesar Rp141.115.030.563,00
- Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Transfer Dana Perimbangan Pemerintah Pusat-DAK Non Fisik TA 2023 dianggarkan sebesar Rp263.760.236.416,00 dengan realisasi sebesar

Rp269.600.444.517,00 atau 102,21% dari anggaran. Realisasi Penerimaan Transfer Dana Perimbangan Pemerintah Pusat-DAK Non Fisik mengalami peningkatan sebesar Rp29.827.759.994,00 atau 12,44% bila dibandingkan dengan penerimaan tahun sebelumnya sebesar Rp239.772.684.523,00

### 3.1.1.2.1.2 DANA INSENTIF DAERAH (DID)-LRA

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan untuk memberikan insentif/penghargaan kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan/pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan berupa Dana Insentif Daerah pada TA 2023 dengan anggaran Rp29.383.259.000,00 telah terealisasi sepenuhnya atau 100,00%. Dari realisasi tersebut jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp2.438.134.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp26.945.125.000,00 atau 1.105,15%. Rincian DID dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.9**

**Anggaran dan Realisasi Dana Insentif Daerah (DID)-LRA TA 2023**

No	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Tahun 2023			Realisasi (Rp) Tahun 2022
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Dana Insentif Daerah (DID)	29.383.259.000,00	29.383.259.000,00	100	2.438.134.000,00
1.	DID	29.383.259.000,00	29.383.259.000,00	100	2.438.134.000,00

### 3.1.1.2.1.3 DANA DESA-LRA

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Dana Desa sebagai komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. DD ditujukan untuk mengatasi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat desa; mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan yang berlandaskan keadilan dan kearifan lokal; meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial; meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa; mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat desa; meningkatkan

pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Anggaran Dana Desa pada TA 2023 sebesar Rp242.462.582.000,00 dan terealisasi sepenuhnya atau 100,00%. Jika dibandingkan Realisasi TA 2022 sebesar Rp245.879.771.000,00 dapat dikatakan turun sebesar Rp3.417.189.000,00 atau 1,39%.

**Tabel 3.10**

**Anggaran dan Realisasi Dana Desa-LRA TA 2023**

No	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Tahun 2023			Realisasi (Rp) Tahun 2022
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Dana Desa	242.462.582.000,00	242.462.582.000,00	100	245.879.771.000,00
1.	Dana Desa	242.462.582.000,00	242.462.582.000,00	100	245.879.771.000,00

**3.1.1.2.2 PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH -LRA**

Pendapatan Transfer Antar Daerah pada TA 2023 merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi. Pendapatan tersebut dianggarkan sebesar Rp151.985.127.482,00 dengan realisasi sebesar Rp136.423.483.140,00 atau 89,76%. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah mengalami penurunan sebesar Rp567.326.494,00 atau 0,41% dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp136.990.809.634,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 3.11**

**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA TA 2023**

No	PENDAPATAN TRANSFER	Tahun 2023			Realisasi (Rp) Tahun 2022
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	151.985.127.482,00	136.423.483.140,00	89.76	136.990.809.634,00
1.	Pendapatan Bagi Hasil	138.780.127.482,00	123.749.375.637,00	89.17	122.999.737.000,00
2.	Bantuan Keuangan	13.205.000.000,00	12.674.107.503,00	95.98	13.991.072.634,00

**3.1.1.2.2.1 PENDAPATAN BAGI HASIL-LRA**

Pendapatan bagi hasil adalah Pendapatan bagi hasil pajak atas pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Pendapatan bagi hasil TA 2023 sebesar Rp123.749.375.637,00 atau 89,17,% dari anggaran sebesar

138.780.127.482,00. Dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp122.999.737.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp749.638.637,00 atau 0,61%.

**Tabel 3.12**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA TA 2023**

No	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Tahun 2023			Realisasi (Rp) Tahun 2022
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>Pendapatan Bagi Hasil</b>	<b>138.780.127.482,00</b>	<b>123.749.375.637,00</b>	<b>89,17</b>	<b>122.999.737.000,00</b>
1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	138.780.127.482,00	123.749.375.637,00	89,17	122.999.737.000,00

### 3.1.1.2.2 BANTUAN KEUANGAN-LRA

Bantuan keuangan BPKPAD Kabupaten Temanggung TA 2023 adalah bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi dengan anggaran sebesar Rp13.205.000.000,00 yang terealisasi sebesar Rp12.674.107.503,00 atau 95,38%. Dibandingkan dengan TA 2022 dengan realisasi sebesar Rp13.991.072.634,00 mengalami penurunan sebesar Rp(1.316.965.131,00) atau (9,41)%.

**Tabel 3.13**  
**Anggaran dan Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi-LRA TA 2022**

No	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	Tahun 2023			Realisasi (Rp) Tahun 2022
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>Bantuan Keuangan</b>	<b>13.205.000.000,00</b>	<b>12.674.107.503,00</b>	<b>95,38</b>	<b>13.991.072.634,00</b>
1.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	13.205.000.000,00	12.674.107.503,00	95,38	13.991.072.634,00

### 3.1.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LRA

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Tahun 2022 dianggarkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 atau sebesar 100,00%. Sedangkan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 telah dilaksanakan oleh OPD masing-masing. (Pendapatan Hibah Dana BOS).

**Tabel 3.14**

**Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA TA 2023**

No	PENDAPATAN DAERAH	Tahun 2023			Realisasi (Rp) Tahun 2022
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	0,00	0,00	0,00	<b>1.000.000.000,00</b>
1.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00

**3.1.1.3 .1 PENDAPATAN HIBAH-LRA**

Pendapatan Hibah – LRA merupakan Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri pada TA 2023 tidak ada pendapatan Hibah pada BPKPAD Kabupaten Temanggung. sedang Pendapatan Hibah pada Tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 atau sebesar 100,00%. dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.15**

**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah-LRA TA 2023**

No	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Tahun 2022			Realisasi (Rp) Tahun 2022
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>PENDAPATAN HIBAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000.000,00</b>
1.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00

**3.1.2. BELANJA-LRA**

Belanja Daerah adalah belanja yang ada dalam LRA dengan realisasi dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2023 dan telah dipertanggungjawabkan oleh Bendahara pengeluaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung sebesar Rp427.610.626.681,00 atau 99,36% dari target Rp430.352.555.222,00. Belanja

Daerah BPKPAD Kabupaten Temanggung TA 2023 berdasarkan jenis kelompoknya terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer dengan anggaran dan realisasi yang dirinci sebagai berikut:

**Tabel 3.16**

**Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah-LRA TA 2023**

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi (Rp) Tahun 2022
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>430.352.555.222,00</b>	<b>427.610.626.681,00</b>	<b>99,36</b>	<b>435.255.337.305,00</b>
1.	BELANJA OPERASI	21.816.716.415,00	20.437.722.246,00	93,68	16.821.948.336,00
2.	BELANJA MODAL	12.250.000,00	12.250.000,00	100	2.460.868.111,00
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	800.000.000,00	0		0
4.	BELANJA TRANSFER	407.723.588.807,00	407.160.654.435,00	99,86	415.972.520.858,00

Realisasi belanja daerah TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp7.644.710.624,00,00 atau turun 1,76% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp435.255.337.305,00. dikarenakan pada kegiatan belanja modal realisasi Tahun 2023 Rp. 12.250.000,00 sedangkan di Tahun 2023 sebesar Rp. 2.460.868.111,00 juga di belanja transfer di Tahun 2023 Rp 4077.160.654.435,00, sedang di Tahun 2022 sebesar RP 415.972.520.858,00.

**3.1.2.1 BELANJA OPERASI-LRA**

Belanja Operasi dengan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp20.437.722.246,00 atau 99.36% dari anggaran sebesar Rp21.816.716.415,00. Realisasi Belanja Operasi terdiri dari Rp16.723.736.915,00 (97.47%) realisasi belanja pegawai dan Rp3.713.985.331,00 (79.72%) realisasi belanja barang dan jasa. Terdapat koreksi pengembalian atas belanja operasi (Belanja Pegawai) sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah
Pengembalian kelebihan belanja honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.	100.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>100.000,00</b>

**Tabel 3.17**

**Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi-LRA TA 2023**



No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi (Rp) Tahun 2022
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>BELANJA OPERASI</b>	21.816.716.415,00	20.437.722.246,00	<b>99,36</b>	<b>16.821.948.336,00</b>
1.	Belanja Pegawai	17.157.755.915,00	16.723.736.915,00	97,47	12.909.854.321,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	4.658.960.500,00	3.713.985.331,00	79,72	3.912.094.015,00

Realisasi belanja Operasi TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp3.615.773.910,00 atau naik 21,497% dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 yaitu sebesar Rp16.821.948.336,00.

### 3.1.2.1 .1 BELANJA PEGAWAI-LRA

Belanja Pegawai TA 2023 dianggarkan sebesar Rp17.157.755.915,00 dengan realisasi sebesar Rp16.723.736.915,00 atau 97,47% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.18**

#### **Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai-LRA TA 2023**

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi (Rp) Tahun 2022
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>17.157.755.915,00</b>	<b>16.723.736.915,00</b>	<b>97,47</b>	<b>12.909.854.321,00</b>
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	10.366.067.706,00	10.067.141.912,00	97,12	6.713.292.540,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.711.203.209,00	2.676.753.978,00	98,73	2.191.651.781,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.415.515.000,00	3.320.878.525,00	97,23	3.562.315.000,00
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	664.970.000,00	658.962.500,00	99,10	442.595.000,00

Jika dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai TA 2022 maka dapat dikatakan mengalami kenaikan sebesar Rp3,813,882,594,00 atau naik 29,54%. Pada Tahun 2023 terjadi perubahan status yang dulu CASN menjadi ASN sebanyak 23 Pegawai.

### 3.1.2.1.2 BELANJA BARANG DAN JASA - LRA

Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dianggarkan sebesar Rp4.658.960.500,00 dengan realisasi sebesar Rp3.713.985.331,00 atau 79,72% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.19**

**Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa – LRA TA 2023**

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi (Rp) Tahun 2022
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	4.658.960.500,00	3.713.985.331,00	79,72	3.912.094.015,00
1.	Belanja Barang	1.045.305.400,00	807.594.223,00	77,26	1.187.536.371,00
2.	Belanja Jasa	2.805.845.600,00	2.361.634.701,00	84,17	1.943.459.009,00
3.	Belanja Pemeliharaan	104.650.000,00	59.181.100,00	56,55	129.227.974,00
4.	Belanja Perjalanan Dinas	363.159.500,00	240.249.547,00	66,15	254.158.911,00
5.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	340.000.000,00	245.325.760,00	72,15	397.711.750,00

Realisasi belanja Barang dan Jasa TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp198.108.684,00 atau turun 5,06% dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 yaitu sebesar Rp3.912.094.015,00.

**3.1.2.2 BELANJA MODAL-LRA**

Pada Tahun 2023 realisasi Belanja Modal senilai Rp12.250.000,00 atau 100% dari anggaran Rp12.250.000,00. Realisasi Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.20**

**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal-LRA TA 2023**

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi (Rp) Tahun 2022
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>BELANJA MODAL</b>	12.250.000,00	12.250.000,00	<b>100</b>	<b>2.460.868.111,00</b>
	<b>BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN</b>	12.250.000,00	12.250.000,00	100	2.460.868.111,00
1.	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	12.250.000,00	12.250.000,00	100	2.460.868.111,00

Realisasi belanja modal TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.448.618.111 atau turun 98730,04% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar Rp**2.460.868.111,00**. hal ini disebabkan karena belanja pengadaan pada Tahun 2023 hanya tersedia belanja CCTV dengan rincian sebagai berikut:

<u>Keterangan</u>	<u>Jumlah</u>
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya (CCTV)	12.250.000,00
<b>JUMLAH</b>	12.250.000,00

### 3.1.2.2.1 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN-LRA

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk pembentukan modal; seperti pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud atau barang inventaris dengan nilai manfaat lebih dari satu periode akuntansi (1 tahun), termasuk di dalamnya menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset, Realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2023, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 3.21**

**Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin-LRA TA 2022**

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi (Rp) Tahun 2022
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>12.250.000,00</b>	<b>12.250.000,00</b>	<b>100</b>	<b>499.274.200,00</b>
1.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0	0	0	99.700.000,00
2.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.250.000,00	12.250.000,00	85,53	14.321.700,00
3.	Belanja Modal Komputer	0	0	0	385.252.500,00

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp487.024.200,00 atau turun (97,55)% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp499.274.200,00. di Tahun 2023 belanja modal peralatan dan mesin menambah belanja CCTV dengan nilai Rp. 12.250.000,00

### 3.1.2.2.2 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN-LRA

Belanja modal gedung dan bangunan TA 2023 tidak dianggarkan untuk kegiatan tersebut, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 3.22**

### Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan-LRA TA 2023

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi (Rp) Tahun 2022
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	0	0	0	1.985.807.111,00
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung	0	0	0	1.985.807.111,00

Pada Tahun Anggaran 2022 terdapat anggaran untuk belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp. 1.985.807.111,00 dengan realisasi 100,00%. Anggaran tersebut diadakan dan digunakan untuk penyelesaian administrasi gedung kantor BPKPAD Kabupaten Temanggung, sedang untuk Tahun 2023 tidak ada penambahan untuk kegiatan tersebut.

#### 3.1.2.3 BELANJA TIDAK TERDUGA-LRA

Belanja Tak Terduga dialokasikan dalam APBD dalam upaya penanganan atau penanggulangan akibat dari bencana alam, bencana sosial, dan pelaksanaan kewenangan daerah. Belanja Tak Terduga TA 2023 dianggarkan sebesar Rp800.000.000,00 dan tidak ada realisasi kegiatan tersebut.

**Tabel 3.23**

#### Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga-LRA TA 2023

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi (Rp) Tahun 2022
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	800.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00
1.	Belanja Tidak Terduga	800.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 dengan anggaran senilai Rp800.000.000,00 tidak ada realisasi dikarenakan tidak adanya penanganan atau penanggulangan akibat dari bencana alam, bencana sosial, dan pelaksanaan kewenangan daerah di Tahun 2023.

#### 3.1.2.4 BELANJA TRANSFER-LRA

Belanja Transfer TA 2023 dianggarkan sebesar Rp407.723.588.807,00 dengan realisasi sebesar Rp407.160.654.435,00 atau 99,86% dari anggaran.

**Tabel 3.24**

### Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer-LRA TA 2022

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi (Rp) Tahun 2022
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>407.723.588.807,00</b>	<b>407.160.654.435,00</b>	<b>99.86</b>	<b>415.972.520.858,00</b>
1.	Belanja Bagi Hasil	7.997.804.000,00	7.985.769.628,00	99.85	7.936.684.862,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan	399.725.784.807,00	399.174.884.807,00	99.86	408.035.835.996,00

Belanja Transfer TA 2023 dengan realisasi sebesar Rp407.160.654.435,00 jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp415.972.520.858,00 dapat dikatakan mengalami penurunan sebesar Rp8.811.866.423,00 atau 2,12%. Terdapat beberapa koreksi pengembalian pada belanja Transfer yaitu:

Keterangan	Jumlah
Pengembalian Belanja Bankeudes TA 2023 Kegiatan Pembangunan Selokan Dukuh Desa Jragan SP2D 3502686 tanggal 24 Mei 2023	60.000.000,00
Pengembalian Belanja Bankeudes Insentif RT RW SP2D 3504106 tanggal 20 Juli 2023	300.000,00
Pengembalian Belanja Dana Bankeudes Penataan Lingkungan Desa Dsn Tawangsari Desa Kedu SP2D 3504844 tanggal 21 Agustus 2023	15.000.000,00
Pengembalian Belanja Bankeudes TA 2023 Kegiatan Pembangunan/Rehab Drainase dan Senderan RT 03 RW 01 Kemirirejo I Desa Danupayan	30.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>105.300.000,00</b>

#### 3.1.2.4.1 BELANJA BAGI HASIL-LRA

Belanja Bagi Hasil TA 2023 dianggarkan sebesar Rp7.997.804.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.985.769.628,00 atau 99,85% dari anggaran. Belanja Bagi Hasil TA 2023 dirinci dalam tabel berikut:

**Tabel 3.25**

### Anggaran dan Realisasi Belanja Bagi Hasil-LRA TA 2023

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi (Rp) Tahun 2022
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>BELANJA BAGI HASIL</b>	<b>7.997.804.000,00</b>	<b>7.985.769.628,00</b>	<b>99,85</b>	<b>7.936.684.862,00</b>

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi (Rp) Tahun 2022
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
1.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	6.951.000.000,00	6.951.000.000,00	100,00	6.951.000.000,00
2.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.046.804.000,00	1.034.769.628,00	98,85	985.684.862,00

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp**7.936.684.862,00** maka dapat dikatakan Belanja Bagi Hasil naik Rp49.084.766,00 atau 0,62%.

#### 3.1.2.4.2 BELANJA BANTUAN KEUANGAN-LRA

Belanja Bantuan Keuangan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp399.725.784.807,00 dengan realisasi sebesar Rp399.174.884.807,00 atau 99,86% dari anggaran.

**Tabel 3.26**

#### **Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan-LRA TA 2023**

No	Uraian	Tahun 2023			Realisasi (Rp) Tahun 2022
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>	<b>399.725.784.807,00</b>	<b>399.174.884.807,00</b>	<b>99,86</b>	<b>408.035.835.996,00</b>
1.	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	399.725.784.807,00	399.174.884.807,00	99,86	408.035.835.996,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp8.860.951.189.00 atau 2.17% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp**408.035.835.996,00**. Dari nilai Rp399.725.784.807,00 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari Rp51.712.302.807,00 Belanja Bantuan Keuangan Umum dan Khusus serta Rp347.462.582.000,00 Dana Desa. Terdapat beberapa koreksi atas pengembalian belanja Bantuan Keuangan sebagai berikut:

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
Pengembalian Belanja Bankeudes TA 2023 Kegiatan	60.000.000,00

Pembangunan Selokan Dukuh Desa Jragan SP2D 3502686  
tanggal 24 Mei 2023

Pengembalian Belanja Bankeudes Insentif RT RW SP2D 3504106 tanggal 20 Juli 2023 300.000,00

Pengembalian Belanja Dana Bankeudes Penataan Lingkungan Desa Dsn Tawang Sari Desa Kedu SP2D 3504844 tanggal 21 Agustus 2023 15.000.000,00

Pengembalian Belanja Bankeudes TA 2023 Kegiatan Pembangunan/Rehab Drainase dan Senderan RT 03 RW 01 Kemirirejo I Desa Danupayan 30.000.000,00

**JUMLAH 105.300.000,00**

### Surplus (Defisit)

Surplus TA 2023 adalah sebesar Rp1.336.119.994.065,00 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

Pendapatan	Rp1.763.730.620.746,00
Belanja	<u>Rp427.610.626.681,00</u>
<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>Rp1.336.119.994.065,00</b>

### 3.1.3. Pendapatan-LO

Penjelasan akun-akun Pendapatan Laporan Operasional (LO) menguraikan secara singkat mengenai saldo-saldo akun Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023. Pendapatan LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.580.452.063.546,00 yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.27**

**Rincian Pendapatan Daerah-LO per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Keterangan	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	<b>PENDAPATAN DAERAH - LO</b>	<b>1.580.452.063.546,00</b>	<b>1.541.428.223.904,77</b>	<b>39.023.839.641,23</b>	<b>2.53</b>
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	110.143.302.519,00	110.503.533.724,77	360.231.205,77	0.33
2.	PENDAPATAN TRANSFER-LO	1.470.308.761.027,00	1.340.196.395.180,00	130.112.365.847,00	9.71

3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	0.00	90.728.295.000,00	(90.728.295.000,00)	(100)
4.	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	0,00	16.110.580,40	(16.110.580,40)	(100)

### 3.1.3.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 sebesar Rp110.041.712.161,52 terdiri atas 3 (tiga) jenis PAD yaitu Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.28**

#### Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Keterangan	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>	<b>110.041.712.161,52</b>	<b>110.503.533.724,77</b>	<b>(461.821.563,25)</b>	<b>(0,42)</b>
1.	Pajak Daerah-LO	79.677.898.921,00	74.838.725.816,00	4.839.173.105,00	6,47
2.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	21.311.076.871,52	22.735.276.238,40	(1.424.199.366,88)	(6,26)
3.	Lain-lain PAD yang Sah-LO	9.052.736.369,00	12.929.531.670,37	(3.876.795.301,37)	(29,98)

### 3.1.3.1.1 PAJAK DAERAH-LO

Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 sebesar Rp79.677.898.921,00 terdiri atas pendapatan dari 9 (sembilan) jenis pajak dengan rincian sebagai berikut

**Tabel 3.29**

#### Rincian Pajak Daerah-LO per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Keterangan	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	<b>Pajak Daerah-LO</b>	<b>79.677.898.921,00</b>	<b>74.838.725.816,00</b>	<b>4.839.173.105,00</b>	<b>6,47</b>
1.	Pajak Hotel-LO	280.879.388,00	228.953.674,00	51.925.714,00	22,68
2.	Pajak Restoran-LO	3.486.050.798,00	2.878.287.838,00	607.762.960,00	21,12
3.	Pajak Hiburan-LO	98.912.750,00	100.279.100,00	(1.366.350,00)	(1,36)



4.	Pajak Reklame-LO	1.007.387.934,00	849.474.671,00	157.913.263,00	18,59
5.	Pajak Penerangan Jalan-LO	21.913.140.117,00	21.418.648.947,00	494.491.170,00	2,31
6.	Pajak Parkir-LO	150.060.151,00	131.790.956,00	18.269.195,00	13,86
7.	Pajak Air Tanah-LO	320.787.735,00	348.634.395,00	(27.846.660,00)	(7,99)
8.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)-LO	26.628.055.685,00	26.037.092.793,00	590.962.892,00	2,27
9.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	25.792.624.363,00	22.845.563.442,00	2.947.060.921,00	12,90

### 3.1.3.1.2 HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN-LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 sebesar Rp21.311.076.871,52 merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha) berupa penerimaan dividen, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.30**

#### **Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Keterangan	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO</b>	<b>21.311.076.871,52</b>	<b>22.735.276.238,40</b>	<b>(1.424.199.366,88)</b>	<b>(6,26)</b>
1.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO	21.311.076.871,52	22.735.276.238,40	(1.424.199.366,88)	(6,26)

### 3.1.3.1.3 LAIN-LAIN PAD YANG SAH-LO

Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 sebesar Rp9.052.736.369,00 merupakan PAD yang tidak termasuk selain kedua kategori di atas. Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 terdiri atas 7 (tujuh) jenis pendapatan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.31**

#### **Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Keterangan	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	<b>Lain-lain PAD yang Sah-LO</b>	<b>9.052.736.369,00</b>	<b>12.929.531.670,37</b>	<b>(3.876.795.301,37)</b>	<b>(29,98)</b>
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	405.608.200,00	0,00	405.608.200,00	(55,55)
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	1.898.996.944,00	2.010.709.059,37	(111.7012.115,37)	(55,55)
3.	Jasa Giro-LO	309.851.264,00	467.911.281,00	(158.060.017,00)	(33,78)
4.	Pendapatan Bunga-LO	4.855.908.998,00	8.406.164.287,00	(3.550.255.289,00)	(42,23)
5.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	0	11.650.000,00	(11.650.000,00)	(100)
6.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	469.938.947,00	220.327.089,00	249.611.858	113,29
7.	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	333.338.344,00	154.235.884,00	179.102.460,00	116,12
8.	Pendapatan dari Pengembalian-LO	779.093.672,00	1.658.534.070,00	(879.440.398)	(53,63)

### 3.1.3.2 PENDAPATAN TRANSFER-LO

Pendapatan Transfer merupakan penerimaan uang dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah lainnya berupa Dana Perimbangan, DID, DD, Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Pendapatan Transfer Tahun 2023 sebesar Rp1.402.075.753.190,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.32**

#### **Rincian Pendapatan Transfer-LO per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Keterangan	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.402.075.753.190,00</b>	<b>1.340.196.395.180,00</b>	<b>61.879.358.010,00</b>	<b>4,62</b>
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.267.171.752.532,00	1.202.907.447.335,00	64.264.305.197,00	5,34
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	134.904.000.658,00	137.288.947.845,00	(2.384.947.187,00)	(1,74)

### 3.1.3.2.1 PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp1.267.171.752.532,00 yang merupakan transfer dari Pemerintah Pusat yang terdiri atas Dana Perimbangan dan DID dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.33**

#### **Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Keterangan	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO</b>	<b>1.267.171.752.532,00</b>	<b>1.202.907.447.335,00</b>	<b>64.264.305.197,00</b>	<b>5,34</b>
1.	Dana Perimbangan-LO	1.237.788.493.532,00	1.200.469.313.335,00	37.319.180.197,00	3,11
2.	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	29.383.259.000,00	2.438.134.000,00	26.945.125.000,00	1.105,15

### 3.1.3.2.2 PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO

Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan penerimaan uang dari Pemerintah Provinsi/Pemerintah Daerah lainnya berupa Bantuan Keuangan dan Pendapatan bagi hasil seperti Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi Tahun 2023 sebesar Rp134.904.000.658,00 sedangkan pada Tahun 2022 Pemerintah Provinsi merealisasikan pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp137.288.947.845,00. Realisasi Pendapatan transfer antar daerah tahun 2023 menurun sebesar Rp2.384.947.187,00 atau -1.74%.

**Tabel 3.34**

#### **Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO per 31 Desember 2022 dan 2021**

No	Keterangan	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO</b>	<b>134.904.000.658,00</b>	<b>137.288.947.845,00</b>	<b>2.384.947.187,00</b>	<b>1,74</b>
1.	Pendapatan Bagi	122.229.893.155,00	123.297.875.211,00	1.067.982.056,00	0,87

	Hasil-LO				
2.	Bantuan Keuangan	12.674.107.503,00	13.991.072.634,00	1.316.965.131,00	9,41

### 3.1.3.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah dari sumber lain yaitu pendapatan hibah, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang diterima pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp0,00.

**Tabel 3.35**

**Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Keterangan	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO</b>	<b>0,00</b>	<b>90.728.295.000,00</b>	<b>(90.728.295.000,00)</b>	<b>(100)</b>
1.	Pendapatan Hibah-LO	0,00	90.728.295.000,00	(90.728.295.000,00)	(100)
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0.00

### 3.1.4. BEBAN - LO

**Tabel 3.36**

**Rincian Beban-LO per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Keterangan	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	<b>BEBAN DAERAH</b>	<b>183.311.553.985,00</b>	<b>189.061.702.397,51</b>	<b>(5.750.148.412,51)</b>	<b>-3,04</b>
<b>1.</b>	<b>BEBAN OPERASI</b>				
1.a	Beban Pegawai - LO	15.214.288.413,00	13.266.511.323,00	1.947.777.090,00	14,68
1.b	Beban Barang dan Jasa	3.484.357.330,00	3.933.869.811,00	(449.512.481,00)	-11,42
1.c	Beban Penyisihan Piutang	(85.164.193,00)	71.744.266,20	(156.908.459,00)	-218,705
<b>2.</b>	<b>BEBAN</b>				

No	Keterangan	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	<b>TRANSFER</b>				
2.a	Beban Bagi Hasil	7.985.769.628,00	7.936.684.862,00	49.084.766,00	0,61
2.b	Beban Bantuan Keuangan	156.712.302.807,00	162.156.064.996,00	(5.443.762.189,00)	-3,35
<b>3.</b>	<b>BEBAN TIDAK TERDUGA</b>				
3.a	Beban Tidak Terduga	0,00	0,00	0(100,00%)	

Beban Daerah Tahun 2023 Rp**183.311.553.985,00** menurun 0,61% dari Beban Daerah Tahun 2022 yang realisasinya Rp. **189.061.702.397,51**. Beban Daerah Tahun 2023 terdiri dari Beban Operasi, Beban Transfer.

### 3.1.5. ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Komposisi dan nilai saldo Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp448.780.735.354,32 yang tersaji sebagai berikut:

**Tabel 3.37**

#### **Saldo Aset-Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
	<b>ASET</b>	448.780.735.354,3 2	<b>470.833.697.614,62</b>	<b>(22.052.969.260,30)</b>	<b>(4.68)</b>
1.	Aset Lancar	82.400.831.371,30	103.853.539.830,88	(21.452.708.459,58)	(20.60)
2.	Investasi Jangka Panjang	223.558.822.109,62	222.606.550.910,34	952.271.199,28	0,43
3.	Aset Tetap	139.353.256.873,40	139.341.006.873,40	12.250.000,00	0,01
4.	Dana Cadangan	3.455.030.000,00	5.000.000.000,00	(1.544.970.000,00)	(30.90)

5.	Aset Lainnya	12.795.000,00	32.600.000,00	(19.805.000,00)	(60.75)
----	--------------	---------------	---------------	-----------------	---------

### 3.1.5.1 ASET LANCAR

Aset lancar BPKPAD Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp82.400.831.371,30. Aset lancar BPKPAD Kabupaten Temanggung pada TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp(21.452.708.459,58) atau (20.60)% dari TA 2022 sebesar Rp103.853.539.830,88. Aset lancar BPKPAD Kabupaten Temanggung dapat dirincikan sebagai berikut:

**Tabel 3.38**

**Saldo Aset Lancar-Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Jenis Aset Lancar	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
	<b>ASET LANCAR</b>	<b>82.400.831.371,30</b>	<b>103.853.539.830,88</b>	<b>(21.452.708.459,58)</b>	<b>(20.66)</b>
1.	Kas dan Setara Kas	78.072.662.747,00	98.189.629.481,00	(20.116.966.734,00)	(20.49)
2.	Piutang Pajak Daerah	4.687.187.780,50	4.685.791.536,50	1.396.244,00	0.03
3.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	315.321.201,00	315.321.229,58	(28.58)	(0,00)
4.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.474.901.502,00	2.518.071.502,00	(43.170.000,00)	(1.71)
5.	Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	1.522.636.906,00	(1.522.636.906,00)	(100)
6.	Penyisihan Piutang	(3.535.183.547,20)	(3.535.183.547,20)	-	-
7.	Persediaan	385.941.688,00	157.272.723,00	(228.668.965,00)	145.40

Penjelasan :

- Kas dan Setara Kas

Nama Rekening	Jumlah (Rp)
Kas di Kas Daerah	<u>78.072.662.747,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>78.072.662.747,00</b>

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 adalah Rp78.072.662.747,00 yang merupakan akumulasi dari seluruh saldo-saldo kas di Bendahara Umum Daerah (BUD) yang terdiri dari Nomor Rekening RKUD KAB. TEMANGGUNG, BPD Bank Jateng 1014000431 per 31 Desember 2023 yang telah direkonsiliasikan dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)
1	Kas di Daerah	78.072.662.747,00	98.189.629.481,00
2	BPD Bank Jateng	78.085.451.657,00	98.189.629.481,00
	Selisih Saldo Kas	12.788.910	0,00

selisih saldo kas Tahun 2023 merupakan uang titipan/kas yg dibatasi penggunaannya yg bersumber dari dana BOP kesetaraan yg belum disetor di RKUN

Terdapat pemindahbukuan kredit Bank Jateng sebesar Rp. 6.090 yg belum dikembalikan ke RKUD,

- Piutang Pajak Daerah

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.389.323.056,50 merupakan kewajiban pihak ketiga atas pajak daerah yang hingga 31 Desember 2023 belum disetor oleh wajib pajak ke rekening kas daerah, dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp. 5.042.476.049,50 mengalami penurunan 12,95%, piutang pajak tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Nama Rekening	Tahun 2022	Tahun 2023
Piutang Pajak Hotel	800.000,00	450.000,00
Piutang Pajak Restoran	20.173.932,00	24.172.494,00
Piutang Pajak Hiburan	1.325.932,00	1.325.000,00
Piutang Pajak Reklame	101.930.461,50	71.858.552,50
Piutang Pajak Penerangan Jalan	1.820.752.086,00	1.942.285.734,00
Piutang Pajak Parkir	401.250,00	20.660.300,00
Piutang Pajak Air Tanah	6.192.840,00	0

Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.607.720,00	5.607.720,00
Piutang PBB-P2	2.730.494.293,00	1.788.244.509,00
Piutang BPHTB	763.668,00	763.668,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.042.476.049,50</b>	<b>4.389.323.056,50</b>

- Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp315.321.201,00 yang terdiri atas Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD

- Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Saldo Piutang Lain – Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.474.901.502,00, Piutang Lain-Lain PAD yang Sah dapat dirinci sebagai berikut:

<b>Nama Rekening</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	354.034.799,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	<u>2.120.866.703,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>2.474.901.502,00</b>

- Piutang Transfer Antar Daerah

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp ... yang terdiri atas Piutang Bagi Hasil.

- Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 sebesar (Rp(3.535.183.547,20) Adapun saldo penyisihan piutang tersebut berasal dari Penyisihan Piutang Pendapatan.

- Persediaan



Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Aset Lancar Persediaan pada akhir Tahun 2023 senilai Rp219.970.196,00 terdiri dari persediaan barang pakai habis dengan rincian sebagai berikut :

<b>Uraian</b>	<b>Saldo 2023 (Rp)</b>	<b>Saldo 2022 (Rp)</b>	<b>Kenaikan/ (Penurunan)</b>	<b>%</b>
Bahan Bangunan dan Konstruksi	5.577.750,00	5.582.750,00	(5.000,00)	(0.09%)
Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	1.920.000,00	(1.920.000,00)	(100%)
Bahan Lainnya	0,00	478.000,0	(478.000,00)	(100%)
Suku Cadang Alat Angkutar	0,00	7.796.000,00	(7.796.000,00)	(100%)
Suku Cadang Alat Besar	0,00	0,00	(0,00)	(100%)
Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	0,00	(0,00)	(100%)
Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	0,00	(0,00)	(100%)
Alat Tulis Kantor	15.593.200,00	9.530.800,00	6.062.400,00	63.61%
Kertas dan Cover	20.053.885,00	16.029.740,00	4.024.145,00	25.10%
Bahan Cetak	127.906.735,00	63.984.220,00	63.922.515,00	99.90%
Benda Pos	2.590.000,00	4.900.000,00	(2.310.000,00)	(47.14%)
Bahan Komputer	42.198.426,00	37.543.663,00	4.654.763,00	12.40%
Perabot Kanto	1.395.450,00	2.080.550,00	(685.100,00)	(32.93%)

Alat Listrik	4.654.750,00	4.995.000,00	(340.250,00)	(6.81%)
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	2.422.000,00	(2.422.000,00)	(100%)
Pakan	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>(10.000,00)</u>	<u>(100%)</u>
<b>Jumlah</b>	<b>219.970.196,00</b>	<b>157.272.723,00</b>	<b>62.697.473,00</b>	<b>39.86%</b>

### 3.1.5.2 INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang merupakan investasi permanen untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi Jangka Panjang yang dilakukan oleh BPKPAD Kabupaten Temanggung berbentuk Investasi Jangka Panjang Non Permanen berupa Dana Bergulir dan Investasi Jangka Panjang Permanen yang berupa penyertaan modal. Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp223.558.822.109,62 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp222.606.550.910,34 bertambah sebesar Rp952.271.199,28 atau sebesar 0,43%. Investasi Jangka Panjang BPKPAD Kabupaten Temanggung dapat dirincikan sebagai berikut:

**Tabel 3.39**

#### **Saldo Investasi Jangka Panjang-Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021**

No	Jenis Investasi Jangka Panjang	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>223.558.822.109,62</b>	<b>222.606.550.910,34</b>	<b>952.271.199,28</b>	<b>0,43</b>
1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	657.751.473,99	406.026.406,40	251.725.067,59	62,00
2.	Investasi Jangka Panjang Permanen	222.901.070.635,63	222.200.524.503,94	700.546.131,69	0,32

Penjelasan:

- Investasi Jangka Panjang Non Permanen dari Tahun 2023 mengalami penurunan Rp657.751.473,99 (62,00%) dibanding Tahun 2022 akibat dana bergulir kepada masyarakat di Tahun 2023.

- Investasi Jangka Panjang Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Jangka Panjang Permanen yang dilakukan oleh BPKPAD Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 berupa penyertaan modal BUMD sebesar Rp222.901.070.635,63 dimana jika dibandingkan dengan Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.807.414.000,00 atau 0,8%.

### 3.1.5.3 ASET TETAP

Aset Tetap merupakan aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dan nilainya material. Dalam perhitungan Neraca BPKPAD Kabupaten Temanggung, Aset Tetap terdiri atas: (1) Tanah; (2) Peralatan dan Mesin; (3) Gedung dan Bangunan; (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan; (5) Aset Tetap Lainnya; dan (6) Akumulasi Penyusutan. Nilai Aset Tetap BPKPAD Kabupaten Temanggung disajikan sesuai dengan harga perolehan realisasi belanja modal dan kapitalisasi dari harga perolehan realisasi selain dari belanja modal seperti honor tim pengadaan, jasa pihak ketiga (jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan) dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka perolehan aset tetap tersebut. Saldo aset tetap BPKPAD Kabupaten Temanggung per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp153.385.076.987,00 dan sebesar Rp139.341.006.873,40 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.40**

**Saldo Aset Tetap-Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Jenis Aset Tetap	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
	<b>ASET TETAP</b>	153.385.076.987,00	<b>139.341.006.873,40</b>	<b>14.044.070.113,00</b>	<b>10,07</b>
1.	Tanah	116.954.821.442,00	116.954.821.442,00	0	0
2.	Peralatan dan Mesin	8.885.063.602,00	8.442.465.471,00	442.598.131,00	5,24
3.	Gedung dan Bangunan	24.994.389.501,00	24.994.389.501,00	0	0
4.	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.859.611.249,00	1.859.611.249,00	0	0
5.	Aset Tetap Lainnya	143.674.500,00	143.674.500,00	0	0
6.	Akumulasi Penyusutan				

Penjelasan :

- Aset Tetap berupa Tanah BPKPAD Kabupaten Temanggung merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai dan dikuasai, meliputi antara lain harga pembelian, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan serta biaya lainnya yang berkaitan dengan kepemilikan tanah. Nilai Aset Tanah Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp116.954.821.442,00, untuk nilai Aset Tanah tidak terdapat perubahan.
- Aset tetap berupa peralatan dan mesin yang dimiliki oleh BPKPAD Kabupaten Temanggung merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Peralatan dan Mesin sampai siap pakai dan dikuasai, meliputi harga pembelian, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkannya agar dapat digunakan. Nilai peralatan dan mesin TA 2023 dan TA 2022 masing-masing sebesar Rp8.885.063.602,00 dan Rp8.442.465.471,00. Mutasi aset peralatan dan mesin TA 2022 bertambah sebesar Rp824.560.992,00 dan berkurang sebesar Rp327.962.861,00. Berikut Mutasi aset tetap peralatan dan mesin Tahun 2023:

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>Saldo Awal Per 1 Januari 2023</b>	<b>8.442.465.471,00</b>
<b>Mutasi Masuk</b>	<b>824.560.992,00</b>
CCTV	13.250.000,00
PC Axioo MYPC PRO K5 sejumlah 3 unit	30.000.000,00
Epson PLQ 50 sejumlah 3 unit	24.000.000,00
- Suzuki/FL/125 SD AA 9839 NE	17.826.862,00
- Honda/NF/125 TRF AA 9988 NE	15.050.730,00
- Honda/MCB AA 9655 JE	9.000.000,00
- Honda/GL 15AID M/T AA 9648 PE	17.916.900,00
- Honda/GLn160D AA 9817 NE	16.995.000,00
- Honda/NF 100 AA 9693 JE	10.900.000,00
- Supra/ NF 100 AA 9823 LE	10.820.000,00
HONDA/WIN	9.026.000,00
HONDA/WIN	9.050.000,00

HONDA/WIN	9.026.000,00
SUSUKI/TS 125/TS125CC	10.000.000,00
HONDA/WIN/MCB	9.026.000,00
HONDA/WIN/MCB	9.026.000,00
SUZUKI/THUNDER/EN125A	14.450.000,00
SUZUKI/Tunder/EN12	14.500.000,00
HONDA/WIN	9.026.000,00
HONDA/WIN	9.026.000,00
HONDA/WIN	9.026.000,00
HONDA/WIN	9.026.000,00
Honda/Impresa/C100/-	6.000.000,00
Suzuki/Thunder/EN125A-	14.450.000,00
suzuki FL 125 SD/FL	12.082.600,00
Suzuki/TRS	7.000.000,00
Honda Win	9.026.000,00
SUZUKI /THUNDER/EN125A	14.450.000,00
HONDA/WIN/MCB	9.026.000,00
TIMOR/S515-I	60.000.000,00
SUZUKI/FL 125 SD	12.082.600,00
HONDA/WIN MCB/Sepeda Motor	9.026.000,00
Suzuki Thunder/EN 125 A/-	14.354.250,00
Suzuki Thunder/EN 125 A/-	14.354.250,00
Honda/MCB/-	8.245.000,00
HONDA/WIN	9.026.000,00
HONDA/WIN	9.026.000,00
HONDA/WIN	9.026.000,00
HONDA/MCB	4.000.000,00
HONDA/GL 160 D	17.850.000,00
SUZUKI/EN 125 A	14.450.000,00
HONDA/NF 125 TR	14.625.000,00

HONDA/GL 160 D	17.850.000,00
HONDA/WIN	9.026.000,00
Honda/Win	5.500.000,00
Honda/Win	9.026.000,00
Honda/Win	9.050.000,00
SUZUKI/EN 1254A	14.450.000,00
Honda /Win	9.026.000,00
SUZUKI/THUNDER	14.450.000,00
HONDA WIN/-	9.026.000,00
SUZUKI THUNDER/-	14.450.000,00
Suzuki /FL 125 SD	12.082.600,00
HONDA WIN/HONDA WIN	9.300.000,00
HONDA WIN	9.026.000,00
TOSSA/tsz200-2	30.290.000,00
Toyota Kijang	35.800.000,00
HONDA/MCB	7.000.000,00
SUZUKI/FL 125 SD	12.082.600,00
SUZUKI/FL 125 SD	12.082.600,00
Honda/Win/MCB	9.026.000,00
SUZIKI/TUNDER/-	14.450.000,00
HONDA/NF 100 SL	7.500.000,00
<b>Mutasi Keluar</b>	<b>327.962.861,00</b>
Mesin Ketik Manual sejumlah 1 unit	2.875.000,00
UPS sejumlah 1 unit	14.900.000,00
Filling Kabinet sejumlah 2 unit	2.000.000,00
Brankas sejumlah 1 unit	3.550.000,00
Kursi Putar sejumlah 2 unit	1.590.000,00
PC Unit sejumlah 1 unit	16.000.000,00
Printer (Peralatan PC) sejumlah 1 unit	15.000.000,00
Laptop	6.500.000,00



Printer	1.500.000,00
Printer	1.500.000,00
Printer	2.400.000,00
Printer	1.500.000,00
Printer	3.000.000,00
Printer	1.300.000,00
Kursi Kayu	7.500.000,00
Kursi Kayu	5.845.000,00
Kursi Rapat	6.750.000,00
LCD Monitor	19.780.000,00
Faksimile	4.014.286,00
Clinical Thermometer	2.033.500,00
<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2023</b>	<b>8.885.063.602,00</b>

- Aset tetap berupa gedung dan bangunan yang dimiliki oleh BPKPAD Kabupaten Temanggung merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Gedung dan Bangunan sampai dengan siap pakai dan dikuasai meliputi harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak, serta biaya konstruksi dalam kontrak dan biaya lain yang berkaitan dalam memperoleh aset tersebut. Nilai gedung dan bangunan TA 2023 dan TA 2022 masing-masing sebesar Rp24.994.389.501,00 dan Rp24.994.389.501,00 Tidak ada mutasi aset tetap lainnya pada TA 2023.
- Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan aset tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dimiliki oleh BPKPAD Kabupaten Temanggung, merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai siap pakai, dalam nilai tersebut tidak termasuk nilai tanah. Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 dan TA 2022 masing-masing sebesar Rp1.859.611.249,00 dan Rp1.859.611.249,00. Tidak ada mutasi aset tetap lainnya pada TA 2023
- Aset tetap berupa aset tetap lainnya yang dimiliki oleh BPKPAD Kabupaten Temanggung merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai. Aset Tetap Lainnya merupakan seluruh Aset Tetap yang tidak dapat diklasifikasi dengan tepat ke dalam aset tetap



tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, atau jalan irigasi dan jaringan. Nilai aset tetap lainnya TA 2023 dan TA 2022 masing-masing sebesar Rp143.674.500,00 dan Rp143.674.500,00. Tidak ada mutasi aset tetap lainnya pada TA 2023.

- Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan dari beban penyusutan periodik. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Akumulasi penyusutan aset tetap BPKPAD Kabupaten Temanggung TA 2023 dan TA 2022 masing-masing sebesar Rp dan Rp . Berikut rincian akumulasi penyusutan aset tetap BPKPAD Kabupaten Temanggung TA 2023:

ASET TETAP	SALDO TA 2022 (RP)	PENYUSUTAN TA 2023	KOREKSI ATAS MUTASI	SALDO TA 2023 (RP)
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(1.171.459.926,31)</b>		<b>0,00</b>	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(607.910.918,98)		0,00	
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(499.887.790,02)		0,00	
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(63.661.217,31)		0,00	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00		0,00	

#### 3.1.5.4 DANA CADANGAN

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024, Tahun Anggaran 2022 senilai Rp5.000.000.000,00 dan di Tahun 2023 Rp. 3.455.030.000,00 dana cadangan di Tahun 2023 menurun Rp. 1.544.970.000,00 dicairkan untuk hibah Pilkada.

### 3.1.5.5 ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah Aset Non lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tak Berwujud yang tidak dapat diklasifikasikan menjadi aset lancar ataupun aset tetap. Saldo Aset lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp547.516.693,00 dan Rp552.657.443,00. Aset Lainnya ini terdiri dari (1) Aset Tidak Berwujud, (2) Aset Lain-lain, (3) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud, (4) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya dan (5) Kas Yang Dibatasi Penggunaannya. Aset Lainnya dapat dirinci pada tabel berikut:

**Tabel 3.41**

**Saldo Aset Lainnya-Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Aset Lainnya	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
	<b>ASET LAINNYA</b>			<b>0 0</b>	
1.	Aset Tidak Berwujud	507.306.693,00	507.306.693,00	0 0	
2.	Aset Lain-lain	45.350.750,00	45.350.750,00	0 0	
3.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(507.306.693,00)	(507.306.693,00)	0 0	
4.	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya				
5.	Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	32.600.000,00	32.600.000,00	0 0	

Penjelasan :

- Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik, serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan, serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp507.306.693,00 dan Tahun 2022 Rp507.306.693,00 untuk ATB di Tahun 2023 sama tidak mengalami perubahan saldo, dapat dirinci sebagai berikut:

**Uraian**

**Jumlah (Rp)**

**Saldo Awal Per 1 Januari  
2023**

**507.306.693,00**

<b>Mutasi Keluar</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2022</b>	<b>507.306.693,00</b>

- Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 2022 senilai Rp45.350.750,00 dan Rp45.350.750,00. untuk Aset lain-lain di Tahun 2023 sama tidak ada muatsi dengan rincian sebagai berikut:

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>Saldo Awal Per 1 Januari 2023</b>	<b>45.350.750,00</b>
<b>Mutasi Keluar</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2023</b>	<b>45.350.750,00</b>

- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 senilai Rp507.306.693,00 dan Rp507.306.693,00. untuk Aset Amortisasi di Tahun 2023 sama tidak ada muatsi dengan rincian sebagai berikut:

<b>ASET LAINNYA</b>	<b>SALDO TA 2022 (RP)</b>	<b>PENYUSUTAN TA 2023</b>	<b>KOREKSI ATAS MUTASI</b>	<b>SALDO TA 2023 (RP)</b>
<b>Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>(507.306.693,00)</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>(507.306.693,00)</b>
Software Penatausahaan Keuangan	(369.959.184,00)	0,00	0,00	(369.959.184,00)
Sistem informasi akuntansi keuangan daerah(desentralistik)	(40.000.000,00)	0,00	0,00	(40.000.000,00)
Aplikasi sistem operasi PBB	(19.487.870,00)	0,00	0,00	(19.487.870,00)
Aplikasi pengolah peta PBB	(32.482.280,00)	0,00	0,00	(32.482.280,00)
Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah	(6.000.000,00)	0,00	0,00	(6.000.000,00)
Penyusunan sistem	(15.000.000,00)	0,00	0,00	(15.000.000,00)

<b>ASET LAINNYA</b>	<b>SALDO TA 2022 (RP)</b>	<b>PENYUSUTAN TA 2023</b>	<b>KOREKSI ATAS MUTASI</b>	<b>SALDO TA 2023 (RP)</b>
informasi penatausahaan keuangan				
Oracle All Paket Instan	(24.377.359,00)	0,00	0,00	(24.377.359,00)
Sistem informasi BPHTB dan Pajak Air Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplikasi Pengolah Database PBB	0,00	0,00	0,00	0,00
Coding software PBB	0,00	0,00	0,00	0,00
Manajemen Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Manajemen Pendapatan Daerah / MAPATDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Software penyempurnaan izin reklame	0,00	0,00	0,00	0,00
Software Aplikasi SIMBOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Software penyusunan Modul Laporan Pendapatan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistem informasi manajemen keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00

- Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 senilai Rp0,00 dan Rp45.350.750,00. Mengalami sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut:

<b>ASET LAINNYA</b>	<b>SALDO TA 2022 (RP)</b>	<b>PENYUSUTAN TA 2023</b>	<b>KOREKSI ATAS MUTASI</b>	<b>SALDO TA 2023 (RP)</b>
---------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------

<b>Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya</b>	<b>(225.430.750,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>180.080.000,00</b>	<b>(45.350.750,00)</b>
Sistem informasi akuntansi keuangan daerah (sentralistik)	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
Mapada	40.500.000,00	0,00	40.500.000,00	0,00
Sistem informasi gaji	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
Sistem informasi anggaran keuangan daerah	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
Sistem informasi manajemen barang daerah (simbada)	49.500.000,00	0,00	49.500.000,00	0,00
Aplikasi Pembukuan dan Pembayaran PBB-P2	10.080.000,00	0,00	10.080.000,00	0,00
Peralatan dan Mesin Rusak Berat (Radio)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Peralatan dan Mesin Rusak Berat (Amplifier)	1.170.750,00	0,00	0,00	1.170.750,00
Peralatan dan Mesin Rusak Berat (Lemari Kaca)	2.970.000,00	0,00	0,00	2.970.000,00
Mesin Porporasi	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Stabilisator	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
Trolley	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

- Kas Yang Dibatasi Penggunaannya adalah sejumlah uang yang telah ditentukan penggunaannya atau tidak dapat digunakan secara bebas. Kas yang Dibatasi Penggunaannya merupakan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek. Kas Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 2022 senilai Rp12.795.000,00 dan Rp32.600.000,00. Mengalami penurunan sebesar Rp,00 dengan rincian sebagai berikut:

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>Saldo Awal Per 1 Januari 2023</b>	<b>32.600.000</b>
<b>Penambah</b>	<b>0,00</b>

Penerimaan kas daerah yang bersumber dari dana BOP kesetaraan yang belum disetorkan ke RKUN	<b>12.795.000,00</b>
<b>Pengurang</b>	<b>(32.600.000,00)</b>
Pengeluaran kas dana BOP paud Tahun 2022 yg sudah disetorkan ke RKUN	(32.600.000,00)
<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2023</b>	<b>12.795.000,00</b>

### 3.1.6. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek antara lain dapat berupa Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Kewajiban BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah Kewajiban Jangka Pendek dengan saldo per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.187.042.591,09 dan Rp3.733.204.553,09. Saldo sebesar Rp1.546.161.962,00 tersebut merupakan kewajiban jangka pendek BPKPAD Kabupaten Temanggung yang masih terhutang sampai dengan 31 Desember 2023 atau turun 41,42% dari saldo tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.42**

#### **Saldo Kewajiban - Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Keterangan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>2.187.042.591,09</b>	<b>3.733.204.553,09</b>	<b>(1.546.161.962,00)</b>	<b>(41.41)</b>
1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.187.042.591,09	3.733.204.553,09	<b>(1.546.161.962,00)</b>	(41.41)
1.a	Pendapatan Diterima Dimuka	2.112.831.185,09	2.112.831.185,09	0	(0)
1.b	Utang Belanja	74.211.406,00	1.584.618.944,00	(1.510.407.538,00)	(95.31)
1.c	Utang Jangka Pendek Lainnya	0	35.754.424,00	(35.754.424,00)	(100)

Penjelasan :

- Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa sebesar Rp2.112.831.185,09 sedangkan pada Tahun 2022 merupakan Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III sebesar Rp2.112.831.185,09. Sehingga Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 tetap. Pendapatan Diterima Dimuka dirinci sebagai berikut:

<b>PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA</b>	<b>Rp2.112.831.185,09</b>
<b>Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa</b>	<b>Rp2.112.831.185,09</b>
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya	Rp264.321.404,76
Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Non Persil-Tanah Basah	Rp1.848.509.780,33

- Utang Belanja

Utang belanja BPKPAD Kabupaten Temanggung TA 2023 sebesar Rp1.290.473.214,00 yang terdiri atas utang belanja pegawai (Rp1.218.275.532,00) dan utang belanja barang dan jasa (Rp72.197.682,00) sedang pada Tahun 2022, Utang Belanja dapat dirinci sebagai berikut:

<b>UTANG BELANJA</b>	<b>Rp1.290.473.214,00</b>
Utang Belanja Pegawai	Rp1.218.275.532,00
Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Rp205.599.402,00
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Hotel	Rp2.282.500,00
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran	Rp25.235.013,00
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hiburan	Rp1.815.625,00
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	Rp7.781.250,00
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan	Rp217.875.000,00

Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir	Rp6.225.000,00
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	Rp6.640.000,00
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah- Pajak Bumi Bangunan dan Bangunan Perdesaan	Rp249.000.000,00
Utang Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Rp323.700.000,00
Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	Rp467.500,00
Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	Rp5.168.617,00
Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	Rp371.875,00
Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	Rp1.593.750,00
Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan	Rp44.625.000,00
Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	Rp1.275.000,00
Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	Rp1.360.000,00
Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Rp51.000.000,00
Utang Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah-Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Rp66.300.000,00
<b>Utang Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>Rp72.197.682,00</b>
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	Rp28.000.000,00



Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	Rp14.000.000,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	Rp10.800.000,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	Rp606.276,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	Rp1.486.200,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	Rp15.818.930,00

- Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya BPKPAD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebesar Rp12.795.000,00 adalah Utang Kelebihan Pembayaran Transfer. Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dirinci sebagai berikut:

<b>UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA</b>	<b>Rp12.795.000,00</b>
<b>Utang Kelebihan Pembayaran Transfer</b>	<b>Rp12.795.000,00</b>
Utang Kelebihan Pembayaran Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	Rp12.795.000,00

### 3.1.7. Ekuitas Dana

**Tabel 3.43**

**Saldo Ekuitas-Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022**

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	<b>Ekuitas Awal</b>		<b>423.574.674.225,64</b>
2.	Surplus / (Defisit) LO		1.352.366.521.507,26
3.	Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi		(125.869.993.210,37)
4.	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		(1.182.970.709.461,00)
5.	<b>Ekuitas Akhir</b>		<b>467.100.493.061,53</b>

Transaksi yang menyebabkan perubahan ekuitas Tahun Anggaran 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

EKUITAS	398.375.338.361,23
Surplus / (Defisit) LO	1.328.560.601.964,52
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	(1.285.457.707.536,00)
<b>EKUITAS 31 DESEMBER 2023</b>	<b>400.780.735.354,32</b>

**3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD.**

Laporan keuangan BPKPAD adalah laporan keuangan gabungan dengan SKPKD sehingga nilai yang dilaporkan adalah hasil konsolidasi antara OPD dengan SKPKD.

**BAB IV**  
**PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON**  
**KEUANGAN SKPD**

**A. Domisili dan bentuk hukum**

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 94 Temanggung dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

**B. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah**

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.

**C. Dasar Hukum Operasional Kegiatan**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor : 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung no 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung.

**D. Pejabat Struktural selama tahun berjalan .**

Pada akhir tahun 2023, susunan Pejabat Eselon II, Eselon III & Eselon IV sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Susunan Pejabat Struktural Tahun 2023**

No	Eselon	Jabatan	Nama Pejabat
1	Eselon II/b	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET	TRI WINARNO, S.E.,M.M.

No	Eselon	Jabatan	Nama Pejabat
		DAERAH	
2	Eselon III/a	SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	HUSEIN TSANI UBADDILLAH, SE, M.Si
3	Eselon III/b	KEPALA BIDANG AKUNTANSI & PELAPORAN KEUANGAN	Dra. DYAH EKIANA JUDHANINGRUM, M.Si.
4	Eselon III/b	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN	YUSI SUSANTI, SIP, MM
5	Eselon III/b	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	HILMY TINIKE DHAMAYANTI, SE, MM
6	Eselon III/b	KEPALA BIDANG PENGANGGARAN	EKO GUNADI, S.Sos., M.Si.
7	Eselon III/b	KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN PENETAPAN PENDAPATAN	KARTIKA SARI, ST, M.Eng
8	Eselon III/b	KEPALA BIDANG PENAGIHAN DAN PENGENDALIAN	FERRY WISNUCAHYO B, SE, MM
9	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG PELAPORAN KEUANGAN	ABDUL ROCHMAN, S.Kom.
10	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI	ZIADATUN NI'MAH, SE, M.Acc.
11	Eselon IV/a	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	NELY NIAMAH HANI, S.Sos,MM
12	Eselon IV/a	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	IWAN ADY, S.AP.
13	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG KAS DAERAH	NURUL LAILY PRIYANSEPTI, SE
14	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG PELAYANAN BELANJA	LUTFI AMALIYAH, SE
15	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN	YANUAR ACHMAD CHOLID, A. Md.
16	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN	EKO MEDISUSANTO SUWIYANTANA, ST, MM
17	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG ADMINISTRASI ANGGARAN	KETUT WAHYU ARDHIYANTO, S.E.
18	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	KARTINI YOGANINGSIH, SE MM
19	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN PENETAPAN	TEGUH SUPRIYANTO, SE, M.Si
20	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG PEMBERDAYAAN BARANG MILIK DAERAH	MUHAMMAD KHANIFUDIN, SE.
21	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH	ABDUL ROUF DAROJAT, A. Md
22	Eselon IV/a	KEPALA SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN	ISKAK, SE

## BAB V PENUTUP

Penyelenggaraan Pengelolaan keuangan APBD pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yang meliputi keseluruhan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah memerlukan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas.

Kelancaran kegiatan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan yang dilaksanakan selama Tahun anggaran 2023 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah dalam menangkap aspirasi dan kreasi maupun dalam teknik pelaksanaannya.

TEMANGGUNG,                      JANUARI 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku

Pejabat Pembuat Angggaran Barang



REJININGSO, S.E.,M.M.

Anggota Tingkat I

NIP :197310201999031005